

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tidak lepas dari berbagai permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya. Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen teridentifikasi dalam tabel berikut.

Identifikasi permasalahan pelayanan OPD merupakan hasil analisis Gambaran Pelayanan OPD. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan OPD, dapat kita identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Penampilan fisik gedung perkantoran memang sudah terlihat bagus dan megah namun demikian masih terdapat beberapa gedung perkantoran dan bangunan pendukung lainnya yang nampak kusam dan kurang terawat, hal ini disebabkan oleh usia bangunan yang sudah tua.
- b. Masih banyak ditemukan infrastruktur jalan rusak dan berlobang, yang disebabkan oleh kelebihan muatan (tonase) pengguna jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan maupun akibat bencana alam.
- c. Masih banyak ditemukan masyarakat yang kesulitan dalam mobilisasi arus barang dan jasa antar wilayah dengan jarak tempuh cukup jauh, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya bangunan jembatan penghubung antar wilayah.
- d. Infrastruktur jalan terlihat rusak dan berlobang, yang disebabkan oleh kelebihan muatan (tonase) pengguna jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan maupun akibat bencana alam
- e. Masih ditemukannya masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, hal ini disebabkan oleh banyaknya instalasi pengolahan air bersih yang tidak berfungsi dengan baik, rusak maupun akibat kekeringan sumber mata air.
- f. Masih rendahnya tingkat pencapaian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan dan kurangnya sosialisasi mengenai Perda IMB.

- g. Belum optimalnya penataan ruang di wilayah Kabupaten Kebumen, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan kurangnya sosialisasi mengenai tata ruang di wilayah Kabupaten Kebumen.
- h. Masih banyak jalan lingkungan permukiman yang rusak di wilayah perkotaan dan perdesaan. Hal ini disebabkan belum teralokasinya anggaran yang cukup di seksi prasarana dan sarana permukiman Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang.
- i. Masih ditemukan genangan air di permukiman akibat dari kurangnya bangunan drainase. Kondisi ini disebabkan kurangnya anggaran untuk membangun drainase.
- j. Masih belum tertanganinya air limbah di permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan karena belum ada alokasi anggaran APBD yang khusus menangani air limbah permukiman.
- k. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- l. Adanya perilaku buruk masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan daerah tangkapan air di hulu maupun di badan sungai;
- m. Banyaknya daerah rawan kekeringan sehingga masyarakat sulit mendapatkan air bersih baik untuk kebutuhan sehari-hari atau pengairan pertanian pada setiap musim kemarau datang;
- n. Terbatasnya biaya pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pengairan;
- o. Adanya alih fungsi sawah beririgasi yang tidak sesuai Rencana Tehnis Ruang Wilayah;
- p. Kurangnya kapasitas daya tampung penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat;
- q. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pemafaatan sumber daya air seperti perizinan pemakaian tanah pengairan dan pemakaian air permukaan;
- r. Perlunya peningkatan upaya mitigasi bencana alam geologi, dengan sosialisasi, pemantauan maupun pemasangan alat pantau bencana alam geologi;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang

akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

a. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Visi Bupati Kebumen Tahun 2016-2021 yaitu;

**“BERSAMA MENUJU MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA,
UNGGUL, BERDAYA, AGAMIS DAN BERKELANJUTAN”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang kuat, tangguh dan utama serta mampu menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
5. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan,

kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;

6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek/dimensi jasad/fisiknya saja, melainkan juga dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kemahiran, ketertiban, kegigihan dalam kebaikan dan kebenaran, persaudaraan, persepakatan dalam hidup dan perpaduan dalam umat;
7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat.

b. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi,

kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;

3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen menjabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi OPD. Dalam dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi OPD. Misi ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi

disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi OPD.

Dalam perumusan misi ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperhatikan misi Bupati Kebumen yang terdapat dalam RPJMD. Misi ini sejalan dengan Misi III Bupati Kebumen dan sesuai fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen yaitu:

Misi III : Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.

Misi VI : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Memperhatikan Visi dan Misi Bupati Kebumen tersebut maka peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen adalah bagaimana melaksanakan pembangunan daerah yang senantiasa dilandasi keinginan untuk terus maju dan mandiri, terutama di sektor pekerjaan umum.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini selaras dengan visi :

1. RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005 – 2025 : Kabupaten Kebumen yang Sejahtera, Maju dan Madani.
2. RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 : Jawa Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Lestari.
3. RPJM Nasional Tahun 2015 – 2020 : Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera.

4. RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen diidentifikasi untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambatnya.

3.3 Telahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten

3.3.1 Visi :

Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : **“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**.

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum periode 2015-2019, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang **handal** diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka

negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara

Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang penjabarannya meliputi:

Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat

1. memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
2. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;
3. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
4. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
5. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
6. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan
7. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.

Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

3.3.2 Misi

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015–2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, mengorganisasikan yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

3.3.3 Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sebagai penjabaran atas visi Kementerian PUPR, maka tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber

daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

3.3.4 Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*dampak/Impact* pada level *stakeholders*) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customer yang dilayani*) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Sementara sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customers*) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode 2015-2019 secara keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan.
2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi.
3. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing.
4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
5. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
6. Meningkatnya ketahanan air.
7. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.

8. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
9. Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.
10. Meningkatnya kapasitas dalam pengendalian kualitas konstruksi nasional.
11. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
12. Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas.
13. Meningkatnya budaya Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi dan berintegritas.
14. Meningkatnya inovasi terapan bidang PUPR.
15. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, sarana prasarana dan teknologi informasi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Tantangan pembangunan bidang penataan ruang

- a. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.
- b. Meningkatkan pemanfaatan RTR secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.
- c. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.
- d. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- e. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

3.4.2 Isu strategis bidang penataan ruang

- a. Optimalisasi dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi dan komunikasi penunjang pembangunan daerah.
- b. Peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air untuk mendukung pembangunan bidang

- pertanian dan menjaga ketersediaan air bagi kehidupan masyarakat prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air.
- c. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta karya.
 - d. Peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan SDA.
 - e. Ketersediaan rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat yang semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas
 - f. Peningkatkan kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ untuk mendukung terciptanya ketertiban pengguna kendaraan bermotor dalam mengurangi risiko kecelakaan.
 - g. Peningkatan pelayanan bidang ketenagalistrikan
 - h. Meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
 - i. Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
 - j. Menyelaraskan pola penyusunan RTRW di daerah dalam rangka menjaga keserasian antardaerah dan antartingkatan RTRW.
 - k. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian dan nonpertanian.
 - l. Terbangunnya Ruang Terbuka Hijau guna mendukung pencapaian 20% dari wilayah perkotaan.

3.4.3 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, wilayah Kabupaten/ Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Kabupaten Kebumen merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan sebesar 128.111,50 Ha yang terdiri atas

26 Kecamatan yang terdiri atas komponen yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Ruang wilayah Kabupaten Kebumen dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar - besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti wadah bagi kehidupan manusia yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaanya bukan tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya.

Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrument seperti antara lain AMDAL, dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup, mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan dan program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/ atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam kerangka itulah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, khususnya Seksi Perumahan dan

Tata Ruang Bidang Cipta Karya, berusaha melahirkan produk-produk perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi mengurangi dampak negative terhadap lingkungan perencanaan di Kabupaten Kebumen.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu isu strategik ini, menggunakan analisis *SWOT (strength, weight, opportunity dan threath)*, sebagai berikut;

3.5.1. Analisis lingkungan Internal

Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

No	Faktor	Kekuatan (strengths)	Kelemahan (weaknesess)
1	Sumber Daya Manusia PNS	SDM PNS relatif cukup tersedia.	Keterbatasan SDM PNS kompetensi teknik.
2	Potensi alat berat	Jumlah fasilitas alat berat proyek relatif tersedia	Usia alat berat sudah tua dan rusak
3	Fasilitas kantor dan peralatan kerja	Jumlah Fasilitas kantor dan peralatan kerja relatif cukup tersedia	Kualitas sarpras peralatan kerja relatif kurang canggih/ perlu modernisasi.

3.5.2. Analisis lingkungan Eksternal

Peluang dan tantangan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

No	Faktor	Peluang (opportunities)	Ancaman (treaths)
1	Pembangunan	Tingginya tuntutan masyarakat terhadap percepatan pelaksanaan pembangunan	Tingginya tingkat pengawasan masyarakat terhadap prasarana/ sarana fisik bidang pekerjaan umum
2	Pemakaian Alat Berat	Meningkatnya kebutuhan pemakaian alat berat.	Meningkatnya jumlah pesaing/ pemilik alat berat dalam penyediaan alat berat

3	Otonomi Daerah	Kewenangan otonomi daerah yang didasarkan pada otonomi luas nyata dan bertanggungjawab	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat
---	----------------	--	---

3.5.3. Analisis SWOT

SWOT	STRENGHTS (S)	WEAKNESS (W)
<div>Analisis Lingkungan Internal</div> <div>Analisis Lingkungan Eksternal</div>	<div>1. SDM PNS relatif cukup tersedia.</div> <div>2. Jumlah fasilitas alat berat proyek relatif tersedia</div> <div>3. Jumlah Fasilitas kantor dan peralatan kerja relatif cukup tersedia</div>	<div>1. Keterbatasan SDM PNS kompetensi teknik</div> <div>2. Usia alat berat sudah tua dan rusak.</div> <div>3. Kualitas sarpras peralatan kerja relatif kurang canggih/ perlu modernisasi.</div>
OPPORTUNITIES (O)	(SO)	(WO)
<div>1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap percepatan pelaksanaan pembangunan</div> <div>2. Meningkatnya kebutuhan pemakaian alat berat.</div> <div>3. Kewenangan otonomi daerah yang didasarkan pada otonomi luas nyata dan bertanggungjawab</div>	<div>1. Pemenuhan kebutuhan percepatan pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum secara merata dan berkeadilan serta bersifat aspiratif dan representatif.</div> <div>2. Pemenuhan kebutuhan manajemen pengadaan alat-alat berat proyek secara profesional dan proporsional.</div> <div>3. Pemenuhan kebutuhan meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik pekerjaan umum.</div>	<div>1. Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi pendidikan teknik secara formal bagi SDM perangkat dinas.</div> <div>2. Pemenuhan kebutuhan pengadaan serta peremajaan alat alat berat proyek dan fasilitas</div> <div>3. Pemenuhan kebutuhan penerapan pemakaian prasarana/ sarana kerja perangkat daerah yang berteknologi canggih/ mutakhir</div>

TREATHS (T)	(ST)	(WT)
1. Menurunnya tingkat kemampuan pelayanan/ pengawasan prasarana/ sarana fisik bidang pekerjaan umum 2. Meningkatnya jumlah pesaing/ pemilik alat berat dalam penyediaan alat berat. 3. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat	1. Pemenuhan kebutuhan mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana fisik di semua bidang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. 2. Pemenuhan kebutuhan meningkatkan pelayanan terhadap pemakaian dan mobilitas alat berat. 3. Pemenuhan kebutuhan meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan pembangunan prasarana/ sarana fisik sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah.	1. Pemenuhan kebutuhan peningkatan pengembangan pengetahuan serta ketrampilan dalam perencanaan pelaksanaan pengawasan pengendalian pemeliharaan prasarana/ sarana fisik di bidang pekerjaan umum. 2. Pemenuhan kebutuhan penanganan perbekalan operasional alat berat 3. Pemenuhan kebutuhan peningkatan dan peremajaan prasarana/ sarana kerja perangkat daerah

Kabupaten Kebumen secara administrasi merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan secara geografis terletak di bagian selatan yang berbatasan dengan,

- Sebelah selatan Samudera Hindia
- Sebelah utara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo
- Sebelah timur Kabupaten Purworejo
- Sebelah barat Kabupaten Cilacap dan Banyumas.

Sebagai kabupaten yang terletak di jalur selatan Jawa, Kabupaten Kebumen berada diantara daerah yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, yaitu Kabupaten Banyuwawas dan Cilacap sebelah barat dan Provinsi Yogyakarta sebelah timur. Potensi ini

mendorong Kabupaten Kebumen untuk mempersiapkan infrastruktur yang memadai yang mampu menjawab tuntutan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian.

Kekuatan dan keunggulan daerah yang dimiliki Kabupaten Kebumen perlu terus digali dan dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam (SDA), hasil bumi/pertanian dan pariwisata memberi kontribusi besar pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) untuk terus dipacu, diberdayakan dan ditingkatkan dari tahun ke tahun. Potensi keindahan alam diharapkan mampu memberikan warna pada dunia pariwisata sebagai destinasi pilihan, berdampingan dengan agrowisata berupa hasil bumi dan pertanian.

Perhatian besar untuk terus meningkatkan daya saing daerah mendapat dukungan penuh dari para stakeholder atau pemangku kepentingan. Strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan visi misi Bupati Kebumen pun telah dilakukan melalui alokasi anggaran yang mendukung kegiatan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur mendapat perhatian serius mengingat masih banyaknya kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Namun demikian, ketersediaan anggaran untuk pembiayaan proyek infrastruktur masih terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan.

Gambaran jelas kondisi infrastruktur yang menjadi bidang tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, sebagai berikut;

1. Masih rendahnya pelayanan infrastruktur jalan yang baik, hal ini dapat dilihat dari kondisi jalan mantap kabupaten tahun 2017, total panjang jalan kabupaten 960,35 km dengan kondisi baik sepanjang 508,64 km atau 52,96 %, kondisi sedang sepanjang 177,45 km atau 18,48%, kondisi rusak ringan sepanjang 121,17 km atau 12,62 % dan kondisi rusak berat sepanjang 153,09 km atau 15,94 %.
2. Meningkatnya kerusakan jalan akibat kondisi struktur tanah yang labil dan bencana alam.
3. Masih rendahnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi.

4. Masih adanya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan pemanfaatan ruang.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kebumen dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
6. Masih ditemukannya daerah yang mengalami krisis air bersih pada musim kemarau terutama daerah pegunungan, akibat ketiadaan sumber mata air atau sumber mata air mati serta kerusakan bangunan SPAM Air Bersih. Wilayah Kabupaten Kebumen yang berpotensi krisis air bersih meliputi Kecamatan Ayah, Rowokele, Buayan, Sempor, Karanggayam, Sruweng, Karangsambung, Sadang, Padureso, Alian dan Poncowarno.
7. Masih ditemukan genangan di permukiman perkotaan akibat kurang optimalnya fungsi drainase.
8. Belum optimalnya rehabilitasi Daerah Irigasi untuk menunjang produktivitas pertanian guna mendukung kedaulatan pangan;
9. Masih kurangnya penanganan kerusakan Sungai, muara dan pantai akibat banjir dan abrasi gelombang air laut;